

ABSTRAK

OUTSOURCHING (ALIH DAYA) DAN PENGELOLAAN TENAGA KERJA PADA PT INDOFARM SUKSES MAKMUR MENURUT UNDANG-UNDANG NO 13 TAHUN 2003 (TENTANG KETENAGAKERJAAN)

Perlindungan hukum terhadap pekerja merupakan pemenuhan hak dasar yang melekat dan dilindungi oleh konstitusi sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 “Tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”, dikarenakan berlakunya Pasal 64 sampai Pasal 66 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pengusaha seakan mendapat legalisasi memberlakukan praktek outsourcing tanpa memperhatikan hal-hal yang dilarang oleh Undang-Undang. Alasan utama outsourcing bagi perusahaan adalah meningkatkan konsentrasi bisnis karena kegiatan operasional telah dilimpahkan kepada pihak lain.

Penelitian ini akan menganalisis tentang pokok pokok permasalahan sesuai dengan ruang lingkup masalah yang sedang terjadi, sebagaimana telah disebut diatas menggunakan pendekatan yuridis normatif. Dimana pendekatan yuridis normatif ini merupakan pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan asas asas hukum berkaitan dengan peraturan perundang-undangan berhubungan dengan penelitian ini. Data yang diperoleh, dituangkan dalam suatu rancangan konsep yang kemudian dijadikan dasar utama dalam memberikan analisis. Dalam penelitian ini yang digunakan dalam menganalisa data yang sudah diperoleh adalah dengan cara deskriptif (non statistik).

Peran Hukum melalui penetapan upah minimum dalam mewujudkan kesejahteraan pekerja/buruh di Provinsi Sumatera Utara pada saat ini belum bekerja sebagaimana mestinya. Peran hukum melalui penetapan upah minimum masih belum dapat membantu untuk mewujudkan kesejahteraan para pekerja/buruh.

Kata Kunci : *Outsourcing*, Undang Undang Ketenagakerjaan, Buruh , Pengupahan.

OUTSOURCING AND LABOR MANAGEMENT AT PT INDOFARM MAKMUR IN ACCORDANCE WITH LAW NO 13 OF 2003 (ON MANPOWER)

According to Article 27 paragraph (2) of the 1945 Constitution, "Every citizen has the right to work and a decent livelihood for humanity," legal protection for employees is the realization of essential rights inherent and guaranteed by the constitution. Entrepreneurs appear to have been legalized as a result of the implementation of Article 64 to Article 66 of Law Number 13 of 2003 regulating Manpower, to police outsourcing practices while ignoring items that are illegal under the law. The primary motivation for corporations to outsource is to boost company concentration by delegating operational operations to other parties.

Using a normative legal method, this research will assess the key concerns in line with the breadth of the problem that is occurring, as described above. This normative juridical method is one that is based on the major legal content as well as legal concepts pertaining to legislation relevant to this inquiry. The information gathered is placed into a concept design, which is then utilized to provide analysis. This study uses a descriptive (non-statistical) approach to analyze the data collected.

The function of the legislation in ensuring the welfare of workers/laborers in North Sumatra Province is currently not operating as well as it should be. The law's involvement in regulating the minimum wage is still insufficient to ensure the welfare of employees and laborers.

Outsourcing, Labor Law, Labor, and Wages are some of the terms used in this article.